

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PERBUATAN CURANG PELAKU USAHA PERTAMINI DALAM  
MEMPERDAGANGKAN BAHAN BAKAR MINYAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 84/Pid.Sus/2020/PN Wat)**

**Oleh :  
Fabian Fadhilillah Ramadhan  
E1A018203**

**ABSTRAK**

Tingkat penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi oleh masyarakat semakin meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak sehingga beberapa pihak membuka usaha Pertamina sebagai suatu peluang usaha meski hanya bermodalkan mesin pengisian bahan bakar saja tanpa disertai izin usaha maupun penerapan standar pengisian yang telah ditetapkan dalam penjualan bahan bakar minyak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas perbuatan curang pelaku usaha Pertamina dalam memperdagangkan bahan bakar minyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Wat).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, jurnal dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidentifikasi dan dipelajari yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis, logis dan rasional. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimas Sigit Yulianto selaku pelaku usaha Pertamina telah bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun hakim kurang mempertimbangkan pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Konsumen, Bahan Bakar Minyak, Perbuatan Curang

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AGAINST CHEATING  
ACTIVITIES OF PERTAMINI BUSINESSES IN TRADING FUEL OIL  
BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER  
PROTECTION  
(STUDY DECISION NUMBER 84/Pid.Sus/2020/PN Wat)**

**By :  
Fabian Fadhilillah Ramadhan  
E1A018203**

**ABSTRACT**

*The high level of use of motorized vehicles by the public has increasingly increased the consumption of fuel oil, so that several parties have opened Pertamina businesses as a business opportunity, even though they only have a refueling machine without a business license or application of filling standards that have been set in selling fuel oil. The enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is expected to guarantee legal protection for consumers in Indonesia. The author is interested in researching how the legal protection of consumers for the fraudulent acts of Pertamina's business actors in trading fuel oil based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (study of decision number 84/Pid.Sus/2020/PN Wat).*

*The approach method used is a normative juridical approach. The data used is secondary data in the form of laws and regulations, literature books, articles, journals and official documents by means of a literature study, namely an inventory of these data which is then identified and studied which is then presented in the form of a systematic, logical and rational description. The method of analyzing legal materials is by using a qualitative normative analysis method.*

*The results showed that Dimas Sigit Yulianto as a Pertamina business actor was guilty of violating the provisions of Article 8 letters a and i of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection even though the judge did not consider business actors also violated the provisions of Article 23 paragraph (1) and (2) Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas and Article 16 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Number 13 of 2018 concerning the Distribution of Oil Fuel, Gas Fuel and Liquefied Petroleum Gas.*

**Keywords :** *Legal Protection, Consumer, Fuel Oil, Cheating Activities*